

**TESIS**  
**ANALISIS PROGRAM BERBASIS GENDER PADA APBD**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN**  
**2018-2019**

***GENDER BASED PROGRAMS ON THE REGIONAL  
INCOME AND EXPENDITURE BUDGET (APBD) OF WEST  
SULAWESI PROVINCE 2018-2019 BUDGET YEAR***

**ANDI DIAN DWI EPIMADYA**  
**P072182003**



**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2021**

**ANALISIS PROGRAM BERBASIS GENDER PADA APBD  
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN  
2018-2019**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi  
Jender dan Pembangunan**

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI DIAN DWI EPIMADYA**

Kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**PENGESAHAN TESIS**  
**ANALISIS PROGRAM BERBASIS GENDER PADA APBD**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN**  
**2018-2019**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI DIANDWI PERIMADYA**

Nomor Pokok: P072128003



Telah dipertahankan di depan panitia ujian tesis

Pada tanggal 3 Februari 2021

dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat

**MENYETUJUI**

**KOMISI PENASIHAT**

Prof. Dr. Nursini, SE., MA  
Ketua

Dr. Ir. Mardiana E. Fachri., MSi  
Anggota

Ketua Program Studi  
Jender dan Pembangunan

Prof. Dr. Nursini, SE., MA



Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Jamaluddin Jompa., M.Sc

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Dian Dwi Epimadya

Nomor Mahasiswa : P 072182003

Program Studi : Jender dan Pembangunan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 03 Februari 2021



menyatakan

ANDI DIAN DWI EPIMADYA

## ABSTRAK

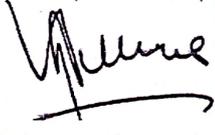
**ANDI DIAN DWI EPIMADYA.** *Analisis Program Berbasis Gender pada APBD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018-2019*  
(dibimbing oleh **Nursini** dan **Mardiana E. Fachry**)

Penganggaran responsif gender adalah pendekatan untuk mengintegrasikan program dalam mencapai kesetaraan gender melalui intervensi anggaran. Pendekatan ini harus diterapkan oleh pemerintah daerah melalui penerapan perspektif gender untuk mengidentifikasi proses, sumber daya, dan mekanisme kelembagaan. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi penganggaran responsif gender di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun anggaran 2018-2019, seberapa besar alokasi anggaran responsif gender dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun kebijakan dan program yang responsif gender.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan deskriptif statistik dengan teknik pengumpulan data sekunder studi data.

Hasil penelitian menunjukkan (1) belum disahkannya peraturan daerah yang diberlakukan untuk melaksanakan penganggaran responsif gender kepada semua instansi pemerintah daerah (SKPD) di dalamnya, sehingga komitmen, kebijakan, kelembagaan berupa pokja dan focalpoint serta data terpilah dan tools belum ada (2) terdapat banyak program untuk meningkatkan dan mempercepat kesetaraan gender, namun alokasi anggaran masih belum mencerminkan penganggaran responsif gender.

**Kata kunci:** *anggaran responsif gender; analisis APBD*

	<b>GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS</b>
Abstrak ini telah diperiksa.  Tanggal: <u>11/01/2021</u>	Paraf Ketua / Sekretaris, 

## ABSTRACT

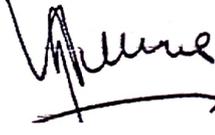
**ANDI DIAN DWI EPIMADYA.** *Gender-Based Program Analysis in The West Sulawesi Provincial Budget for The 2018-2019 Fiscal Year* (supervised by **Nursini** and **Mardiana E. Fachry**)

Gender responsive budgeting is an approach to integrate programs in achieving gender equality through budget interventions. This approach should be applied by local governments through the application of a gender perspective to identify processes, resources and institutional mechanisms. In line with that, this study aims to identify and understand the implementation of gender responsive budgeting in West Sulawesi Province during the 2018-2019 fiscal year, how much the gender responsive budget allocation, and what constraints faced by West Sulawesi Province in formulating policies and gender responsive programs.

This study used a descriptive-qualitative approach and statistical descriptive with secondary data collection techniques.

The results show that (1) the regional regulations that are enforced to implement gender responsive budgeting have not been passed to all local government agencies (SKPD), so that commitments, policies, institutions in the form of working groups and focal points as well as disaggregated data and tools do not exist (2) there are many programs to improve and accelerate gender equality, but the budget allocations still do not reflect gender responsive budgeting.

**Keywords:** *gender responsive budgeting, APBD analysis*

 <b>GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS</b>	
<p>Abstrak ini telah diperiksa.</p> <p>Tanggal: <u>11/01/2021</u></p>	<p>Paraf Ketua / Sekretaris,</p> 

## **PRAKATA**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, rahmat dan hidayahNya sehingga tesis ini dapat dirampungkan sebagai syarat meraih gelar magister.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Prof.Dr.Nursini,SE.,MA sebagai ketua komisi penasehat dan kepada Dr.Ir.Mardiana E Fachri,MS sebagai Anggota komisi penasehat. Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Badariah,S.Pi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat yang banyak membantu dalam pengumpulan data dan informasi, dan terakhir terima kasih juga kepada rekan-rekan yang tidak kami sebutkan namanya satu-per satu, namun telah banyak memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan hasil yang yang berdayaguna dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara

Makassar, 03 Februari 2021

Yang menyatakan

**ANDI DIAN DWI EPIMADYA**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman pengajuan tesis.....	ii
Lembar Pengesahan tesis.....	iii
Pernyataan Keaslian tesis.....	iv
Abstrak.....	v
Abstact.....	vi
Prakata .....	vii
Daftar isi.....	viii
Daftar singkatan .....	xi
Daftar tabel .....	xv
Daftar diagram .....	xviii
Daftar gambar .....	xx
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I. Latar Belakang Masalah .....	1
II. Rumusan Masalah .....	7
III. Tujuan Penelitian .....	8
IV. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
I. Landasan Hukum .....	10
A. Konsep Gender .....	12
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	13
C. Gender Analysis Pathaway .....	13

II.	Hasil Penelitian Terdahulu .....	15
III.	Kerangka Pikir .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>18</b>
I.	Jenis Penelitian .....	18
II.	Jenis dan Sumber Data .....	18
III.	Tehnik Pengumpulan Data .....	20
IV.	Model Analisis .....	22
V.	Lokasi dan waktu Penelitian .....	25
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>26</b>
I.	Gambaran Umum Penelitian.....	26
A.	Gambaran Umum Sumber Daya .....	26
a.	Sumber daya manusia (Pegawai).....	26
b.	Alokasi Anggaran .....	30
1.	Dinas P3AP2KB .....	32
2.	Dinas Kesehatan.....	33
3.	Dinas Pendidikan .....	35
II.	Analisis Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam siklus perencanaan dan penganggaran.....	37
A.	Mengenali Isu Gender di Internal Lembaga .....	37
a.	Dinas P3AP2KB Provinsi Sulawesi Barat.....	37
b.	Dinas Pendidikan .....	42
c.	Dinas Kesehatan.....	45

B. Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Sulawesi	
Barat.....	46
a. Tahapan Persiapan .....	46
b. Tahapan perencanaan dan Penganggaran .....	47
c. Tahapan pelaksanaan kegiatan.....	48
d. Tahap monitoring dan evaluasi .....	50
III. Analisis Anggaran.....	53
A. Persentase alokasi anggaran terintegrasi gender .....	53
a. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	54
b. Dinas Kesehatan.....	59
c. Dinas pendidikan.....	66
IV. Pembahasan .....	69
A. Anggaran khusus target gender.....	72
B. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender .....	73
C. Anggaran kesetaraan gender .....	75
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi.....	78
<b>Bab V : PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
I. Kesimpulan.....	82
II. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR SINGKATAN**

AHH	Angka harapan Hidup
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APE	Anugerah Parahita Ekapraya
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partispasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ARG	Anggaran Responsif Gender
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BLK	Balai Layanan Kesehatan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPKPD	Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah
DP3AP2KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DPA	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DTPK	Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
GAP	Gender Analysis Pathaway
GBS	Gender Budget Statement
Germas	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender

IPG	Indeks Pembangunan Gender
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
KKG	Kesetaraan dan Keadilan Gender
KPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PATBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
Perda	Peraturan Daerah
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PLB	Pendidikan Luar Biasa
PNS	Pegawai Negeri Sipil
Pokja	Kelompok Kerja
PPh	Pajak Penghasilan
PPRG	Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
PT	Perguruan Tinggi

PUG	Pengarusutamaan Gender
PUSPA	Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
PUSPAGA	Pusat Pembelajaran Keluarga
Renja	Rencana Kerja
Renstra	Rencana Strategis
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SD	Sekolah Dasar
SDGs	Sustainable Development Goals
SDM	Sumber Daya Manusia
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TA	Tahun Anggaran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TOT	Training of Trainers
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNDP	United Nations Development Programme

## DAFTAR TABEL

i

<b>Tabel</b>		<b>Hal</b>
1.1	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2019	4
1.2	Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019	5
1.3	Angka rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019	6
2.1	Penelitian Terdahulu	15
3.1	Identifikasi Peran lembaga driver dalam POKJA	24
4.1	Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017	27
4.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017	27
4.3	Jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat	28
4.4	Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat	28

4.5	Jumlah PNS berdasarkan golongan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	29
4.6	Jumlah PNS berdasarkan jenjang Pendidikan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	29
4.7	Proporsi belanja langsung dan tidak langsung APBD Pokok Dinas P3AP2KB, Dinas kesehatan dan Dinas Pendidikan TA 2018-2019	31
4.8	Tabel Program Utama beserta Anggaran pada Dinas P3AP2KB Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018-2019	33
4.9	Tabel Program Utama beserta Anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018-2019	34
4.10	Tabel Program Utama beserta Anggaran pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018-2019	36
4.11	Tugas Pokok dan Fungsi Pokja Provinsi	40
4.12	Proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas P3AP2KB, Dinas Kesehatan dan Dinas pendidikan TA 2018-2019	54
4.13	GAP pada Dinas P3AP2KB Tahun 2018	56
4.14	GAP pada Dinas P3AP2KB Tahun 2019	59
4.15	GAP Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018	62

4.16	GAP Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019	65
4.17	GAP Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2018	68
4.18	GAP Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019	69
4.19	Pengkategorian Anggaran Responsif Gender pada Dinas P3AP2KB, Dinas kesehatan dan Dinas Pendidikan TA 2018-2019	71
4.20	Anggaran Khusus Target Gender pada Dinas P3AP2KB Tahun 2018-2019	72
4.21	Anggaran Pelembagaan Kesetaraan Gender pada Dinas P3AP2KB Tahun 2018-2019	74
4.22	Anggaran Kesetaraan Gender pada Dinas P3AP2KB Tahun 2018-2019	75
4.23	Anggaran Kesetaraan Gender pada Dinas Pendidikan Tahun 2018-2019	77
4.24	Anggaran Kesetaraan Gender pada Dinas Kesehatan Tahun 2018-2019	77

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Hal
4.1 SDM berdasarkan golongan pada Dinas P3AP2KB, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	30
4.2 Proporsi Belanja Langsung pada APBD Pokok Dinas P3AP2KB, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan TA 2018-2019	31
4.3 Proporsi Belanja Langsung	54
4.4 Persentase Anggaran terintegrasi gender Dinas P3AP2KB Tahun 2018	56
4.5 Persentase Anggaran terintegrasi gender Dinas P3AP2KB Tahun 2019	58
4.6 Angka kematian ibu provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2017	61
4.7 Persentase Anggaran terintegrasi gender Dinas Kesehatan Tahun 2018	63
4.8 Persentase Anggaran terintegrasi gender Dinas Kesehatan Tahun 2019	66
4.9 Persentase Anggaran terintegrasi gender Dinas Pendidikan Tahun 2018	67
4.10 Persentase Anggaran terintegrasi gender Dinas Pendidikan Tahun 2019	68

4.11	Pengategorian anggaran responsif gender pada dinas P3AP2KB Tahun 2018	71
4.12	Pengategorian anggaran responsif gender pada dinas P3AP2KB Tahun 2019	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Pikir	17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan kebijakan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan Pemerintah dalam bentuk Undang-undang. Sepatutnya, pembangunan memberikan kemajuan dan keadilan kepada semua rakyat Indonesia. Tetapi pada kenyataannya hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan dan mewujudkan harapan serta kebutuhan dari sebagian warganya, terutama perempuan dan kelompok marginal (miskin). Fenomena inilah yang mendorong aktivitas agar hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh kaum perempuan karena dua alasan yaitu : *pertama*, jumlah kaum perempuan cukup besar di Indonesia bahkan lebih besar dari jumlah kaum laki-laki; *kedua*, bahwa pembangunan yang memberikan kepedulian bagi kemajuan perempuan akan memberikan partisipasi pada percepatan hasil-hasil pembangunan secara keseluruhan.

Pada Konferensi Beijing dideklarasikan bahwa kewajiban Pemerintah untuk memajukan kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian bagi semua perempuan dimanapun, dalam kepentingan kemanusiaan. Upaya representasi dari komitmen ini yaitu program pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). komitmen akan

pengarusutamaan gender di Indonesia tertuang dalam Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utama Gender (PUG). PUG adalah desain untuk memasukan isu dan pengalaman perempuan dan laki-laki ke dalam suatu sudut pandang secara terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program dalam setiap bidang pembangunan, agar perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama. Konsekuensi dari desain ini adalah permintaan adanya penganggaran yang lebih responsif gender atau anggaran yang sensitif gender.

Lembaga Pengarusutamaan Gender (PUG) yang utama pada tingkat Provinsi adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai lembaga esensial dalam memfasilitasi dan mewujudkan PUG, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Selain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lembaga yang penting dalam rangka penerapan pengarusutamaan gender adalah BAPPEDA, Inspektorat dan BPKPD. Kesemuanya mempunyai kontribusi yang penting dalam pengarusutamaan gender dan memperkenalkan pengarusutamaan gender pada proses perencanaan dan proses penganggaran pembangunan sektor publik.

Tidak dapat dibuktikan bahwa pada proses perencanaan dan penganggaran mereka mempertimbangkan asumsi dan dampak dari jenis kelamin. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya implementasi instrumen pengarusutamaan gender sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Indonesia Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).

Selanjutnya, untuk mewujudkan anggaran yang adil, harus ada proses eksplorasi yang terpisah dari sistem yang ada mengenai pola-pola yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yang utama tujuannya bukan untuk menuntut rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki, akan tetapi kerangka kerja atau alat analitis untuk merealisasikan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan tanpa diskriminasi gender. Realisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dikenali dengan hilangnya diskriminasi antar perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, peluang untuk berpartisipasi, mengendalikan pembangunan serta mendapatkan kesetaraan dan manfaat yang sama dari pembangunan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu parameter yang mengungkapkan bagaimana penduduk suatu daerah memiliki peluang dalam mengakses hasil pembangunan sebagai bagian dari haknya

dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dengan diskripsi capaian terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan indeks perolehan kemampuan dasar pembangunan dengan tolak ukur yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data yang presentasikan terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG dipakai untuk mengenali ada tidaknya ketidaksetaraan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan

IPG Provinsi Sulawesi Barat dari terus meningkat waktu ke waktu kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan, tetapi lebih rendah dari rata-rata Nasional :

**Tabel 1.1 :**  
**Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional**  
**Tahun 2015 – 2019**

No	Nama	Indeks Pembangunan Gender ( IPG)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Provinsi Sulawesi Barat	89,52	89.35	89,44	90,05	89.76
2	Nasional	91.03	90.82	90.96	90.99	91.07

*Sumber data : Badan Pusat Statistik*

Kesenjangan gender di Provinsi Sulawesi Barat dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan melalui angka rata-rata lama sekolah dan aspek kesehatan melalui angka harapan hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang. AHH adalah parameter penting yang menggambarkan tingkat kesehatan

masyarakat pada suatu daerah sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan khususnya di sektor kesehatan.

**Tabel 1.2**  
**Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019**

No	Nama	Angka Harapan Hidup ( Tahun)									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Sulawesi Barat	62.36	66.18	62.49	66.20	62.52	66.23	62.76	66.47	62.96	77.78
2.	Nasional	68.93	72.78	69.09	72.80	69.16	73.06	69.30	73.19	69.44	73.33

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kecenderungan AHH perempuan di Sulawesi Barat memperlihatkan kenaikan selama periode 2015-2019. Pada tahun 2015 AHH perempuan mencapai 66,18 tahun, kemudian meningkat menjadi 66,20 di tahun 2016, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 77,78 tahun. Perbandingan AHH perempuan dan laki-laki selama kurun waktu 5 tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jika angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada masalah untuk angka harapan hidup tersebut. Karena jika kita berbicara pengarusutamaan gender maka kita bukan hanya bicara perempuan saja tetapi juga laki-laki. Melihat kondisi angka harapan hidup laki-laki yang dibawah perempuan, harus ada usaha agar kesenjangan harapan hidup tersebut lama-kelamaan menjadi mengecil atau bahkan tidak terdapat kesenjangan.

Selama periode 2015-2019 capaian RLS penduduk laki-laki masih relatif lebih tinggi dari capaian penduduk perempuan. Keadaan ini ditunjukkan oleh realisasi tiap tahun yang mengalami angka perbedaan

tinggi. Di tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki sebesar 7,33 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan sebesar 6,71 tahun. Setiap tahun, capaian tersebut meningkat dan pada tahun 2019 capaian rata-rata lama sekolah penduduk perempuan (7,50 tahun) lebih rendah dari capaian rata-rata sekolah penduduk laki-laki (8,00 Tahun). Capaian rata rata lama sekolah secara rinci di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Angka rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat**  
**Tahun 2015-2019**

No	Nama	Angka Rata-rata lama Sekolah ( Tahun)									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Sulawesi Barat	7,33	6,71	7,4	6,91	7,55	7,08	7,66	7,28	8	7,5
2.	Nasional	8,35	7,35	8,41	7,5	8,56	7,65	8,62	7,72	8,81	7,89

Sumber : Badan Pusat Statistik

Seperti halnya praktek di banyak negara, utamanya di negara-negara berkembang, maka pembangunan di Indonesia juga belum secara ideal melibatkan kaum perempuan. Akibatnya, hasil-hasil pembangunan menjadi bias gender atau bahkan tidak sensitif gender, utamanya pada belum sensitifnya terhadap kebutuhan perempuan, yang dengan sendirinya menghasilkan ketidakadilan gender. Representasi ketidakadilan gender ini antara lain adalah marginalisasi perempuan, dan juga beban ganda yang harus dialami perempuan. (Faqih, 1997:2). Padahal kaum perempuan, sebagai warga negara juga dijamin untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan kebutuhan

spesifiknya, sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui beragam model pelayanan di berbagai aspek kehidupan. Menjadi sebuah keharusan, keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan kaum perempuan terutama melalui intervensi anggaran yang lebih responsif gender. Sasarannya tidak lain adalah merealisasikan kesetaraan gender. Kesetaraan gender sendiri adalah suatu sistem yang memberikan kesempatan perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam beragam aktifitas baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara.

Beberapa penelitian tentang Anggaran Responsif gender mengungkapkan masih banyak daerah di Indonesia belum mengalokasikan anggaran berdimensi gender, sehingga hasil berbagai kebijakan dan program masih menggambarkan kesenjangan gender. Menariknya adalah bahwa belum adanya pengalokasian anggaran berdimensi gender ini lebih banyak dipicu karena pengertian yang salah dari pengambil kebijakan, karena dalam pengertiannya anggaran responsif gender lebih sebagai anggaran netral gender. Oleh karena itu menjadi menarik untuk melihat apakah Provinsi Sulawesi Barat juga telah mengalokasikan anggaran berdimensi gender pada APBD tahun 2018-2019.

## **II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat

khususnya bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan ?.

2. Berapa alokasi anggaran pada program yang responsive gender tahun 2018-2019 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat ?.
3. Problem-problem utama apa yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan Anggaran Responsif Gender (ARG).

### **III. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Sulawesi Barat khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Mengetahui dan menganalisis alokasi anggaran program responsif gender melalui Gender Analysis Pathaway (GAP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat
3. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

#### **IV. Manfaat penelitian**

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam berbagai bidang pembangunan khususnya pendidikan dan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan PUG dan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **I. Landasan Hukum**

Dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional merupakan sinyal bahwa Pemerintah Indonesia peduli terhadap upaya penyetaraan gender dalam masyarakat. Inpres ini dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 19 Desember tahun 2000. Berbagai macam peraturan muncul setelahnya, seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 132 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Tahun 2010, berbagai macam peraturan dikeluarkan terkait upaya mencapai kesetaraan gender memberi arti bahwa hal ini sangatlah penting untuk menjadi perhatian.

Peraturan ini adalah dasar untuk mengembangkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG ini adalah kebijakan Nasional untuk mempercepat pengarusutamaan gender yang telah dikonfirmasi melalui *Joint Circular* (SEB) antara empat Menteri, mereka adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No 270 / M.PPN / 11/2012, Menteri Keuangan dengan No: SE.33 / MK .02 / 2012, Menteri Dalam Negeri No: 050 / 4379A / SJ dan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No SE 46 / MPP-PA / 11/2012 mengenai Strategi Nasional untuk Mempercepat Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Responsif Gender dan Anggaran.

Di daerah setempat, implementasi PPRG sebenarnya telah diamanatkan dalam Permendagri (urusan dalam negeri) peraturan) No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, tetapi penegasan terhadap implementasi PPRG melalui analisis gender<sup>1</sup> baru dinyatakan dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2011 sebagai Amandemen Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Menteri Dalam Negeri menjelaskan tahapan dari implementasi PUG mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi. Itu implementasi strategi PUG ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Implementasi PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan Prosedur Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah Manajemen juncto Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Manajemen Keuangan Daerah.

Hal ini dianggap sangat penting karena PUG sangat berdampak bagi pembangunan daerah. Oedjoe dalam Bastian (2006: 208) menemukan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pembangunan pada akhirnya

---

<sup>1</sup> Analisis gender adalah identifikasi secara sistemik tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis ini dilakukan karena perbedaan peran dan hubungan sosial tersebut berakibat pada perbedaan pengalaman, aspirasi dan kebutuhan, serta perbedaan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan. (KPPA,2012:15)

menurunkan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Daerah dengan IPG, IDG, dan IPM yang rendah mengindikasikan bahwa masyarakat di daerah tersebut sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, kurang mendapatkan perhatian (secara khusus pada bidang kesehatan dan pendidikan), dan banyak ditemukan masyarakat yang menganggur. Hasil yang sama ditemukan di Jerman oleh Klasen (2000) yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan menurunnya kualitas dari SDM (*human capital*). Penelitian dari UNDP secara spesifik membuktikan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki dampak ganda, dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi negara bahkan dunia.

### **A. Konsep Gender**

Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris, "*gender*" berarti "jenis kelamin". Sementara dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai "perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku". Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman (BKkbn,2009).

Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen P3A RI, 2010), gender

adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini, laki-laki dan perempuan didefinisikan dari sudut non-biologis.

### **B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Artinya, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002). Oleh sebab itu sistem penyusunan beserta pelaksanaan anggaran seyogyanya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan atau program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan.

### **C. Gender Analysis Pathway**

*Gender Analysis Pathway* (GAP) merupakan suatu instrumen analisis gender yang digunakan untuk mendukung para perencana dalam melaksanakan pengarusutamaan gender pada proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan memanfaatkan GAP, para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan mampu mengenali kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan terkait gender, sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan

pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut (Bappenas,2001).

Tahap-tahap pelaksanaan GAP menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2001) yaitu :

1. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis
  - a. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis
  - b. Menuliskan tujuan kebijakan/ program/kegiatan.
2. Menyajikan data pembuka wawasan
  - a. Menyajikan data pembuka wawasan yang relevan dengan program/kegiatan baik terpilah menurut jenis kelamin maupun spesifik pada salah satu jenis kelamin
  - b. Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kualitatif atau yang kuantitatif
3. Menganalisis isu gender

Menganalisis isu gender pada OPD yang menjadi *pilot project* penerapan ARG yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Rencana Aksi
  - a. Menetapkan rencana Aksi. Rencana aksi diharapkan dapat mengatasi kesenjangan gender pada OPD yang menjadi *pilot project*
  - b. Penerapan ARG
5. Mengukur hasil apakah ARG telah dialokasikan pada APBD

- a. Identifikasi DPA OPD pada suatu period tertentu
- b. Identifikasi jumlah anggaran untuk kebijakan/program/kegiatan OPD pada suatu periode tertentu.

## II. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diringkaskan dengan tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel yang digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Alfeus Matias Liufeto ( 2019)	APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2019	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan belum mengalokasikan anggaran yang responsif gender pada tahun 2017-2019</li> <li>2. Dinas Kesehatan telah mengalokasikan anggaran yang responsif gender pada program/kegiatan dengan kategori <i>specific gender</i>.</li> <li>3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah mengalokasikan anggaran yang responsif gender dengan kategori <i>specific gender</i> dan <i>affirmative gender</i></li> </ol>
2.	Dody Setyawan <sup>1</sup> , Firman Firdausi <sup>2</sup> , Sugeng Rusmiwari <sup>3</sup> (2018)	Dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan tidak berjalannya Pokja PUG di tingkat Pemerintah Daerah dan <i>Focal Point</i> di tingkat SKPD. Penyusunan anggaran juga tidak menggunakan analisa gender dalam bentuk GAP ( <i>Gender Analysis Pathway</i> ) dan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel yang digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur		GBS ( <i>Gender Budget Statement</i> ).
3.	Puji Astuti	APBD Kota Semarang Tahun 2010-2013	Deskriptif kualitatif	Alokasi anggaran melalui Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di empat SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bapermasper-KB, dan Kantor Kesbangpolinmas menunjukkan bahwa Kota Semarang sudah mengalokasikan anggaran berdimensi gender.

### III. Kerangka Pikir

Berikut merupakan bentuk kerangka pikir dalam penelitian ini :

**Gambar 2.1 :**  
**Kerangka Pikir**

